

DAMPAK PROXY WAR AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA TERHADAP SURIAH DAN UKRAINA SEBAGAI NEGARA PIHAK KETIGA

Rahmi Fitriyanti¹, Salwa Salsabila Azzahra²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Abstract

This article analyzes the impact of the involvement of the United States (US) and Russia in several conflicts occurring in other countries. Proxy war has become a conflict strategy by both sides. There are several countries that are the target of conflict, including Syria and Ukraine. The analysis focuses on the impact of this proxy war on Syria and Ukraine, namely its impact in the political, economic, and humanitarian fields. His analysis refers to the concept of Proxy War and the concept of International Anarchy. Meanwhile, the research method used is a qualitative approach that is descriptive and explanatory. Data sources are obtained from secondary data, namely, journals, mass media, books, and website articles. The findings show that the impact of proxy wars causes significant losses to third-party countries. Much of the infrastructure has been damaged, countless casualties, and various forms of humanitarian crises. Negative impacts are a direct threat to third party countries, although on the other hand many efforts have been made by various parties to stem the impact.

Keywords: Proxy war, Suriah, Ukraina, International anarchy

Abstrak

Artikel ini menganalisis dampak keterlibatan Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam beberapa konflik terjadi di negara lain. Perang proksi (*proxy war*) menjadi strategi konflik oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa negara menjadi target konflik, di antaranya adalah Suriah dan Ukraina. Analisisnya difokuskan pada dampak akibat *proxy war* ini terhadap Suriah dan Ukraina, yaitu dampaknya di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Analisisnya merujuk pada konsep *Proxy War* dan konsep Anarki Internasional. Sedangkan metode riset yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu, jurnal, media massa, buku, dan artikel *website*. Hasil temuan menunjukkan dampak akibat *proxy war* menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara-negara pihak ketiga. Banyak infrastruktur mengalami kerusakan, korban jiwa yang tidak terhitung, serta berbagai bentuk krisis kemanusiaan. Dampak negatif menjadi ancaman langsung bagi negara pihak ketiga, meskipun di sisi lain banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk membendung dampaknya.

Kata Kunci: Proxy war, Suriah, Ukraina, Anarki internasional

Copyright (c) 2024 Rahmi Fitriyanti¹, Salwa Salsabila Azzahra².

✉ Corresponding author : Rahmi Fitriyanti
Email Address : pipitfitriyanti77@gmail.com

PENDAHULUAN

Artikel ini menganalisis dampak perang proksi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia terhadap negara pihak ketiga. Fokus analisis ditujukan terhadap Suriah dan Ukraina sebagai negara pihak ketiga yang menjadi arena proksi terjadi. Walaupun Perang Dingin telah berakhir, hubungan antara AS dan Rusia belum mencapai perdamaian seutuhnya. Dua negara ini masih dibayangkan oleh hubungan masa lalu kelam yang tidak harmonis saat Rusia masih tergabung dalam Uni Soviet. Akibat hubungan masa lalu ini, hingga kini keduanya masih gencar untuk saling bersinggungan, seolah-olah mereka masih berada dalam era Perang Dingin.

Tidak jauh berbeda dari era Perang Dingin, bentuk persinggungan antara keduanya bisa digambarkan seperti "*lethal injection*" yang tampak halus namun mematikan di mana racunnya adalah *proxy war*. Dalam konteks ini, *proxy war* adalah peran pengganti bagi dua negara yang memiliki kepentingan masing-masing tanpa terlibat secara langsung dalam kontak fisik guna menghindari keluarnya biaya perang dalam jumlah besar sehingga menyebabkan negara yang berperan sebagai pihak ketiga menanggung kerugiannya (Mumford, 2013). Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan *proxy war* terhadap negara pihak ketiga sangat besar dan mematikan.

Pada era Perang Dingin, perang saudara di Korea merupakan salah satu contoh *proxy war* antara AS dan Uni Soviet sehingga menyebabkan Korea yang menjadi pihak ketiga terpaksa harus dipisahkan menjadi dua negara yang berbeda (IRB News, 2018).

Negara lain yang menjadi pihak ketiga akibat *proxy war* keduanya adalah Suriah. Pada 2011, ketika Suriah sedang mengalami demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Al-Assad, pemerintah Rusia memberikan bantuan logistik dan persenjataan kepada Al-Al-Assad guna menumpas pemberontak. Di sisi lain, Amerika Serikat dengan dalih untuk menghentikan konflik juga mengintervensi Suriah dan bahkan mendukung pihak pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan Suriah yang didukung Rusia. Ketika mulai melihat intervensi AS di Timur Tengah, Rusia berupaya lebih gencar lagi dalam mendukung pemerintah Al-Al-Assad (Ibrahim, 2018). Akibat intervensi ini, kedua negara besar tersebut tak lagi memikirkan nasib korban yang terdampak beserta krisis yang diakibatkannya di berbagai sektor.

Selain krisis Suriah, konflik yang baru-baru ini terjadi adalah invasi militer Rusia terhadap Ukraina. Invasi ini juga merupakan salah satu bentuk *proxy war* kontemporer. Ukraina merupakan negara yang terlahir dari pecahnya Uni Soviet. Pemerintahan Ukraina yang saat ini lebih mengarah ke Barat telah mendeklarasikan keinginannya untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Keinginan Ukraina tersebut telah mengganggu Rusia karena dinilai mengancam keamanan nasional Rusia. Akibatnya, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Di sisi lain, AS menentang invasi militer besar-besaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dengan mendukung Ukraina sepenuhnya. Bahkan, Hua Chunying yang merupakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China sampai menyebut bahwa AS terlalu ikut campur sehingga menyebabkan kepanikan dan meningkatkan tensi perang (CNN, 2022).

Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh *proxy war* terhadap negara pihak ketiga ini sangat buruk. Selain melumpuhkan jantung kota dengan rusaknya berbagai macam infrastruktur penting, korban jiwa juga banyak berjatuhan dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang tak bisa dibendung lagi.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang digunakan untuk menganalisis dampak *proxy war* AS dan Rusia terhadap Suriah dan Ukraina sebagai negara pihak ketiga adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder, yaitu berupa studi kepustakaan dari berbagai jurnal, media massa, buku, dan artikel *website*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan merujuk pada dua konsep yang digunakan, yaitu, *proxy war* dan anarki internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman *proxy war* menurut Andrew Mumford dalam bukunya *Proxy Warfare* adalah keterlibatan tidak langsung dalam konflik oleh pihak yang ingin mempengaruhi hasil strategisnya. Dengan kata lain, perang proksi adalah produk dari hubungan antarnegara yang memiliki kepentingan namun berada di luar dinamika konflik yang ada. Atau, tidak mempunyai hubungan konflik dengan negara pihak ketiga terpilih yang merupakan saluran senjata, pelatihan, dan pendanaan para negara yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, perang proksi adalah perang pengganti bagi negara-negara yang berusaha untuk memajukan tujuan strategis mereka sendiri, namun pada saat yang sama menghindari terlibat dalam perang langsung dan mengeluarkan biaya (Mumford, 2013).

Karl Deutsch pada 1964 menyebutkan bahwa *proxy war* adalah “*an international conflict between two foreign powers, fought out on the soil of a third country; disguised as a conflict over an internal issue of that country; and using some of that country's manpower, resources, and territory as a means for achieving preponderantly foreign goals and foreign strategies*” (Mumford, 2013).

Proxy war terbagi ke dalam dua level, yaitu, level lokal dan level internasional. Dua level analisis ini saling berkaitan dalam menciptakan dinamika konflik. *Proxy war* di level internasional atau yang melampaui batas negara tidak akan terjadi tanpa adanya konflik pemantik dari dalam negeri yang merupakan level lokal (Mumford, 2013). Berdasarkan argumentasi tersebut, maka konsep *proxy war* relevan dalam menganalisis dampak yang dialami oleh negara pihak ketiga atas perang pengganti yang diakibatkan oleh kompetisi antarnegara *super power*.

Salah satunya adalah konflik di Suriah. Jika tidak terjadi pergolakan atau gelombang demonstrasi yang berusaha menggulingkan Bashar Al-Al-Assad, maka intervensi Rusia dan AS terhadap Suriah tidak akan terjadi.

Berikutnya adalah konsep Anarki Internasional yang juga relevan dalam menganalisis dampak tersebut. Anarki dipahami sebagai suatu situasi di mana tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sebuah negara. Dalam situasi anarki, negara memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur arah politik negaranya dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun. Kedaulatan negara adalah mutlak.

Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sebuah negara (Lechner, 2017).

Kepentingan nasional menjadi tujuan utama yang harus dipenuhi oleh negara walaupun diperoleh dengan cara kekerasan. Dalam kasus *proxy war* antara AS dan Rusia, keduanya merupakan negara *super power* yang hidup dalam situasi anarki internasional. Ketika Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina, tak ada kekuasaan apapun yang dapat menghentikannya. Begitu pula dengan keputusan Rusia dan AS untuk melakukan intervensi terhadap konflik di wilayah lain, yaitu Suriah. Walaupun kedua *super power* ini jelas telah melanggar hukum internasional terkait penggunaan kekerasan militer terhadap warga sipil, mereka tetap tak dapat dihentikan

a. *Proxy war* Amerika Serikat dan Rusia di Suriah

Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara mulai mengubah bentuk kekuatannya yang semula berpusat pada kekuatan militer menjadi tersebar pada kekuatan-kekuatan lain, seperti, kekuatan di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi. Kepentingan nasionalnya juga menjadi lebih beragam. Untuk memenuhi kebutuhannya ini, maka negara-negara mulai berinisiatif membangun aliansi-aliansi yang bertujuan mencapai kepentingan bersama serta berlomba-lomba menunjukkan kehebatannya di dunia internasional. Kondisi ini melibatkan suatu wilayah atau negara lain yang strategis sebagai arena persaingan. Negara-negara pihak ketiga yang dipilih sebagai arena unjuk kekuatan ini sering sekali merupakan negara yang wilayahnya kaya dengan sumber daya alam dan mengalami konflik internal, salah satunya adalah Suriah.

Konflik Suriah bermula ketika muncul pergolakan sosial pada Maret 2011. Pergolakan ini merupakan gerakan anti pemerintah yang terinspirasi dari peristiwa "*Arab Spring*" yang ketika itu terjadi di Timur Tengah. Gerakan pemberontakan ini menuntut agar rezim pemerintahan yang dipimpin Bashar Al-Al-Assad segera digulingkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis (Mudore & Safitri, 2019).

Seperti hamper semua pemerintahan pada umumnya, rezim Al-Al-Assad pun melawan gerakan ini. Ketika perlawanan makin intens dan memanas, rezim tersebut mulai melancarkan serangan militer untuk mempertahankan pemerintahannya. Saat itu, ada empat kelompok yang terlibat dalam konflik Suriah, yaitu, rezim pemerintahan Al-Al-Assad, pihak oposisi, jihadis, dan yang tidak kalah penting adalah intervensi eksternal oleh AS dan Rusia beserta sekutu-sekutunya. Dalam hal ini, kelompok oposisi pemerintah terdiri dari faksi-faksi Islam seperti *Ahrar al-Sham* dan *Faylaq Alsham*. Sedangkan kelompok jihadis adalah *Front Fateh Al-Sham* (sebelumnya *Front Al-Nusra* yang berafiliasi dengan *Al-Qaeda*) yang bersatu ke dalam kelompok "*The Army Conquest*" (Mudore & Safitri, 2019).

Konflik Suriah diperparah oleh intervensi negara asing, yaitu AS dan Rusia yang sama-sama memiliki kepentingan. Dengan dalih menentang rezim Al-Al-Assad yang kekuatan militernya diklaim semena-mena dalam melawan oposisi sehingga menimbulkan banyak korban sipil, maka AS kemudian maju menentang pemerintah sah Suriah. Akan tetapi, di sisi lain, Rusia menganggap

bahwa tindakan rezim Al-Assad dalam mempertahankan pemerintahannya sudah tepat (Finaldin, 2019).

Rusia dan Suriah sudah lama menjalin hubungan bilateral yang kuat. Kedua negara memiliki bisnis perdagangan senjata sejak 1972. Suriah juga memberikan izin kepada Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di daerah Pesisir Tartus yang dimanfaatkan oleh Suriah untuk menangkis serangan militer dari pihak oposisi. Atas dasar kepentingan inilah Rusia bersama sekutunya membela pemerintahan Suriah (Mudore & Safitri, 2019).

Di sisi lain, AS bersama sekutunya, yaitu negara-negara aliansi NATO dan Arab Saudi, mendukung pihak gerakan oposisi dari rezim Al-Assad. AS menganggap serangan balik dari rezim Al-Assad sudah memakan banyak korban jiwa sehingga melanggar HAM. AS bersama sekutunya kemudian berusaha untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Namun, Rusia kemudian menggunakan Hak Vetonya di Dewan Keamanan PBB dengan alasan agar pemerintahan Suriah tidak jatuh ke tangan oposisi (Finaldin, 2019).

Jika dibandingkan antara Rusia dan AS, maka Rusia memiliki kepentingan lebih banyak di Suriah. Setidaknya terdapat dua alasan AS melakukan intervensi terhadap Suriah. Pertama, AS ingin tetap mendapatkan suplai minyak murah dari Timur Tengah di mana Suriah memiliki peranan penting di Timur Tengah. Kedua, seperti yang selalu dilakukan AS dan aliansinya NATO, mereka ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah karena wilayah ini sangat strategis dan kaya dengan sumber daya alamnya. Rusia yang sudah lama berkonflik dengan NATO tentu tidak menyukai perluasan pengaruh AS ini, sehingga Rusia gencar mempertahankan pemerintahan Suriah semaksimal mungkin.

Akibat kontestasi dua *super power* tersebut, posisi Suriah sebagai negara pihak ketiga yang menjadi medan *proxy war* banyak mengalami dampak kerugian. Berbagai dampak negatif yang dialami Suriah di level lokal maupun level internasional tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dampak di Level Lokal

Dampak negatif pertama yang dialami Suriah di level lokal adalah dampak di bidang ekonomi. Konflik berkepanjangan membuat Suriah harus menghadapi kenyataan bahwa *output* ekonomi dan kebebasan berekonomi masyarakatnya menjadi terancam. Menurut data yang diakses dari 2022 *Index of Economic Freedom*, biaya ekonomi atas konflik Suriah melebihi USD1 triliun, termasuk PDB agregat yang hilang karena konflik dan biaya untuk kebutuhan rekonstruksi pada masa depan. Seiring dengan terpilihnya kembali Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah, depresi ekonomi tidak dapat terbendung lagi.

World Food Programme mencatat bahwa 6,5 juta penduduk Suriah tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka. Sebelum adanya konflik, angka kemiskinan angka 28 persen. Setelah terjadinya konflik, angka kemiskinan di Suriah secara keseluruhan meningkat drastis menjadi 80 persen. Selain itu, menurut pihak berwenang Suriah, sektor minyak dan gas sejak 2011 kehilangan sekitar USD74 miliar (Rp1,014 triliun). Lebih lanjut, PBB memperkirakan seluruh biaya kerusakan hampir USD400 miliar (Rp5,482 triliun) (Arbar, 2020).

Pada 2019 saja, ekonomi Suriah menurun hingga mencapai angka 50 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010. Dampak sosial dan ekonomi dari konflik ini juga besar dan terus bertambah. Kurangnya akses berkelanjutan ke

perawatan kesehatan, pendidikan, dan makanan telah memperburuk dampak negatifnya sehingga mengakibatkan jutaan penduduk Suriah jatuh miskin. Dengan sistem perawatan kesehatan yang buruk, warga juga Suriah rentan terhadap krisis lain, seperti wabah COVID-19 (*World Bank*, 2021).

Regulasi pengaturan Hak Kepemilikan di Suriah juga sering dilanggar. Pengambilalihan kepemilikan menjadi hal yang biasa. Meskipun peradilan mempunyai Undang-undang yang independen, namun hakim dan semua pemimpin rezim lainnya, serta Partai Ba'ath yang dilindungi secara konstitusional telah mendominasi pengadilan dan semua bidang lain di pemerintahan.

Korupsi merajalela, termasuk di dalam kekuasaan oposisi daerah. Anggota dan sekutu rezim memiliki dan mengendalikan sebagian besar sektor perekonomian. Konflik sipil yang terus berlanjut telah mengakibatkan kerusakan yang meningkat. Kebijakan ekonomi difokuskan pada upaya perlindungan terhadap rezim serta untuk mempertahankan kapabilitas tempur militer. Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk kepentingan politik dan untuk memenuhi kebutuhan melindungi kepentingan rezim. Pendapatan anggaran dari minyak dan pajak sangat menurun. Sanksi internasional, infrastruktur yang rusak, dan menurunnya daya beli masyarakat mengakibatkan buntunya peluang untuk berkembang bagi pelaku usaha dan pihak swasta.

Selain itu, inflasi telah mencapai rekor tingkat tinggi yang sangat menurunkan daya beli. Ketidakstabilan politik yang diperburuk oleh perang saudara serta ancaman keamanan yang tinggi, telah menghambat sektor perdagangan dan investasi. Lingkungan investasi telah lama tidak memiliki transparansi dan efisiensi. Begitu pula dengan infrastruktur keuangan yang telah terdegradasi secara signifikan oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil.

Selain berdampak negatif di bidang ekonomi, dampak di level lokal akibat *proxy war* yang terjadi di Suriah juga menimpa sektor pendidikan. Krisis di Suriah telah berdampak buruk pada bidang pendidikan. Lebih dari 7.000 sekolah rusak atau hancur, dan sekitar dua juta anak putus sekolah. Menurut UNICEF, terdapat sejumlah tantangan dalam mengusahakan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak konflik di Suriah.

Pertama, semakin banyak generasi anak-anak yang tidak pernah bersekolah. Seiring bertambahnya usia anak-anak tersebut, maka mereka akan menghadapi kesulitan dalam mendaftar dan menyesuaikan diri di sekolah formal. Hal ini selanjutnya akan berdampak menghambat perkembangan dan peluang jangka panjang kehidupan mereka.

Kedua, kurangnya ruang belajar akibat kesulitan ekonomi dan masalah perlindungan yang menghambat pemenuhan hak atas pendidikan anak di Suriah. Ketiga, mereka yang bersekolah menghadapi tantangan sehari-hari berupa ruang kelas yang penuh sesak, luka psikologis akibat pengalaman traumatis, masalah kurikulum dan bahasa, kualitas pengajaran yang tidak memadai, serta kurangnya bahan pembelajaran yang penting. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko putus sekolah. Hampir sepertiga dari anak-anak Suriah yang terdaftar di tingkat sekolah dasar tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya. Keempat, kurangnya transportasi umum bagi guru dari

lokasi atau tempat penampungan mereka ke sekolah tempat mereka akan mengajar (Unicef, 2018).

Lebih dari enam juta penduduk Suriah adalah pengungsi internal (IDP), di mana sekitar 50% dari pengungsi tersebut adalah anak-anak. Untungnya, badan-badan pemerintah termasuk pemerintah Suriah dan badan-badan pemerintah lokal yang lebih kecil memberikan pendidikan yang serupa kepada para pengungsi. Organisasi pemerintah non-Suriah juga terlibat, termasuk kelompok Islam, PBB, dan pemerintah Turki. Meskipun demikian, banyak keluarga Suriah menganggap bahwa berinvestasi di bidang pendidikan untuk anak-anak mereka bukan merupakan sesuatu yang penting. Pandangan yang berkembang akibat minimnya edukasi terhadap orang tua di sektor pendidikan ini akan memperburuk kondisi. Sebagian besar pihak keluarga akan semakin mengalihkan kebutuhan pendidikan anak-anaknya dengan mempekerjakan serta menikahkan anak-anak mereka pada usia dini demi memenuhi kebutuhan keuangan (Bradbury, 2020).

2. Dampak di Level Internasional

Sementara itu, dampak yang dialami Suriah di level internasional terkait dengan krisis kemanusiaan. Sejak konflik Suriah secara resmi dimulai pada 15 Maret 2011, keluarga-keluarga di Suriah telah menderita akibat konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang, menghancurkan infrastruktur negara, dan menghancurkan standar hidup yang sudah ada selama beberapa dekade. Sekitar 6,8 juta orang Suriah adalah pengungsi dan pencari suaka, dan 6,7 juta orang lainnya mengungsi di dalam wilayah Suriah. Artinya, total lebih dari setengah populasi Suriah atau 13,5 juta warganya terlantar secara paksa dan hampir 11,1 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sekitar setengah dari orang yang terkena dampak krisis pengungsi Suriah adalah anak-anak (Reid, 2022). Hampir 13.000 anak telah terbunuh dan cedera sejak konflik dimulai.

Hingga kini, kebutuhan kemanusiaan warga Suriah terus mencapai rekor tertinggi. Konflik yang telah terjadi lebih dari satu dekade dan disertai peningkatan jumlah pengungsi ini makin diperparah oleh dampak COVID-19, kekeringan, dan keruntuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap jutaan warga Suriah yang semakin kesulitan dalam berjuang untuk bertahan hidup. Dampak negatif lainnya juga ditunjukkan oleh melambungnya harga rata-rata bahan makanan pokok yang meningkat 236 persen selama periode Desember 2019 hingga Desember 2020. Sementara itu, kurs mata uang Suriah juga kehilangan nilainya hingga 82 persen terhadap dolar AS akibat meningkatnya krisis ekonomi yang dialami Lebanon selama dua tahun penuh, yaitu pada periode Oktober 2019 hingga Oktober 2021. Akibat dampak negatif di level internasional tersebut, 60 persen dari populasi Suriah kini menghadapi krisis pangan.

Dampak ini makin diperparah oleh tidak berfungsinya sebagian dari fasilitas kesehatan dan sebagian dari sistem pembuangan limbah yang sangat membutuhkan perbaikan. Akses terhadap layanan vital lainnya juga semakin memburuk akibat krisis air karena suhu di Suriah yang lebih tinggi dari rata-rata. Krisis air telah mempengaruhi kualitas dan kuantitas kehidupan lima juta masyarakat Suriah. Kelangkaan air dan listrik di seluruh negeri telah mengakibatkan lumpuhnya fasilitas kesehatan. Kurangnya air bersih

meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, kekurangan air yang berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian tentu akan membuat warga Suriah meninggalkan lahan pertanian dan ternak mereka. Fenomena yang makin memburuk ini telah menghancurkan mata pencaharian, memperburuk kehidupan, serta menimbulkan krisis kelaparan (IRC, 2022).

b. Proxy war Amerika Serikat dan Rusia di Ukraina

Tahun 2022 dimulai dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Padahal, hubungan antara Rusia dan Ukraina sebelumnya selama era Perang Dingin terbilang sangat dekat. Mereka tergabung dalam satu negara federasi bernama Uni Soviet, yaitu negara komunis terkuat pada masanya. Ketika Uni Soviet dan aliansi Pakta Warsawa bubar pada 1991, Ukraina memilih memerdekakan diri dari Uni Soviet melalui sebuah referendum. Walaupun demikian, Rusia memprakarsai terbentuknya *Commonwealth of Independent States* (CIS) antara Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Akan tetapi, kemudian terjadi perpecahan. Ukraina menganggap CIS sebagai sarana bagi Rusia untuk mengendalikan Ukraina. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, kedua negara kemudian menandatangani Perjanjian Persahabatan pada Mei 1997 (Oktarianisa, 2022).

Akan tetapi, suasana damai ini tidak bertahan lama. Hubungan keduanya kembali memanas pada 2014. Di Ukraina muncul gerakan antipemerintah yang menentang supremasi Rusia. Gerakan ini menyebabkan lengsernya Presiden Ukraina yang dianggap pro Rusia pada saat itu, yaitu Viktor Yanukovych. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Rusia untuk menduduki Krimea dan mendukung gerakan separatis di Ukraina Timur (Donetsk dan Luhansk). Di sisi lain, Ukraina juga mulai memperlihatkan keinginan mereka untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), mengikuti jejak sejumlah negara Eropa Timur seperti Polandia (Oktarianisa, 2022).

Situasi inilah yang kemudian membuat Rusia merasa terancam. Hubungan Rusia yang sudah buruk dengan negara-negara NATO, ditambah dengan Ukraina yang secara terang-terangan menginginkan bergabung dengan NATO, telah menimbulkan persepsi ancaman bagi Rusia. Bagi Rusia, pertahanan dan keamanannya menjadi terancam karena dikelilingi oleh pengaruh NATO yang sudah melakukan ekspansi selama sekitar 30 tahun. Rusia sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang Ukraina walaupun sudah mempersiapkan pasukan militernya. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva dalam sebuah wawancara eksklusifnya dengan BBC, Amerika Serikat dan aliansinya NATO yang telah yang membesar-besarkan dan mengobarkan isu penyerangan ini. Akibatnya, Rusia pun mewujudkan perkataan pihak Barat dengan menjalankan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022, yakni setelah Rusia mengumumkan Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Konflik militer antara Rusia dan Ukraina pun tak dapat dibendung lagi (Oktarianisa, 2022).

Seperti pahlawan, AS terlibat dalam konflik ini dan berada di pihak Ukraina. Padahal, pada mulanya AS justru tak ingin mengirimkan bantuan apapun kepada Ukraina dalam memerangi Rusia. Namun, kemudian Presiden AS, Joe Biden, pada 17 Maret 2022 mengumumkan akan mengirimkan bantuan

militer ke Ukraina yang nilainya diperkirakan mencapai USD800 Juta. Rusia merespon Biden dengan mengancam AS bahwa jika AS masih melanjutkan bantuan militernya kepada Ukraina, maka akan ada konsekuensi yang tidak dapat diprediksi terhadap AS dan aliansinya (Channelnewsasia, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, jika dianalisis dari berbagai sudut pandang maka AS sebenarnya tidak memiliki kepentingan vital terhadap Ukraina. Dari sudut pandang geografis, AS tidak berbatasan langsung atau bertetangga dengan Ukraina. Dari aspek ekonomi, Ukraina juga tidak menjadi mitra utama perdagangan internasional AS. Di bidang militer, Ukraina juga tidak menjadi pangkalan militer AS, bahkan Ukraina juga tidak tergabung dalam NATO yang memiliki kedekatan hubungan dengan AS.

Analisis terhadap sejumlah dampak negatif yang dialami oleh Ukraina akibat persaingan antara Rusia dan AS melalui *proxy war* mereka dapat diamati dari berbagai aspek. Berikut ini dampak dari berbagai aspek yang dialami Ukraina akibat konflik ini di level lokal dan level internasional.

1. Dampak di Level Lokal

Dampak di sektor ekonomi merupakan dampak utama yang dialami Ukraina akibat konfliknya dengan Rusia. Sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan berbagai negara terhadap Rusia telah menyebabkan krisis ekonomi global. Terutama menimpa pasar negara-negara berkembang yang ada di Eropa dan Asia Tengah. Ekonomi di kawasan ini diperkirakan menyusut 4,1 persen pada 2022, berbeda dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar tiga persen sebelum perang. Krisis ini menjadi kontraksi kedua dalam beberapa tahun yang dampak negatifnya dua kali lebih besar dari kontraksi yang disebabkan oleh pandemi pada 2020 (World Bank, 2022).

Berdasarkan Laporan Bank Dunia pada 2022 tersebut, perang telah berdampak bagi perekonomian Ukraina yang diperkirakan menyusut sekitar 45,1 persen. Besarnya perkiraan ini akan ditentukan oleh durasi dan intensitas perang. Invasi Rusia telah menghantam perekonomian Ukraina sehingga menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur-infrastruktur utama Ukraina. Perang telah menambah kekhawatiran masyarakat dunia karena diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global secara tajam, menimbulkan lonjakan inflasi dan utang luar negeri, serta meningkatkan kemiskinan. Dampak ekonomi telah memukul pasar komoditas dan keuangan, hubungan perdagangan, serta menimbulkan persoalan migrasi.

Menurut laporan tersebut, Kelompok Bank Dunia telah berupaya mengambil tindakan cepat untuk mendukung rakyat Ukraina. Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Kelompok Bank Dunia ini telah memobilisasi paket pembiayaan darurat sebesar USD925 juta untuk mendukung Ukraina. Bantuan yang dicairkan dengan cepat ini akan digunakan untuk membantu membayar upah pekerja rumah sakit, dana pensiun bagi orang tua, serta program sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dampak di level lokal berikutnya adalah dampak di bidang pendidikan. Menurut data yang dipublikasikan oleh *Ukraine Education Cluster* (UEC), sekitar 5,7 juta anak berumur sekolah (3-17 tahun) telah kehilangan hak mereka untuk belajar akibat adanya konflik. Sehari setelah serangan Rusia terhadap Ukraina, Kementerian Pendidikan dan Pengetahuan Ukraina meliburkan sekolah. Pada 3 Maret 2022, 160 fasilitas pendidikan rusak akibat serangan (UEC, 2022).

Bahkan, *UN Foundation* melaporkan bahwa hanya dalam tempo sebulan setelah invasi, sekitar 1.138 fasilitas pendidikan di Ukraina mengalami kerusakan.

Kondisi ini berbeda dengan nasib anak-anak Ukraina yang mengungsi ke negara-negara lain. Anak-anak Ukraina di negara pengungsian seperti di Austria, Perancis, Hungaria, Polandia, dan Romania telah memperoleh sarana pendidikan. Sarana yang ditawarkan oleh negara penerima ini di antaranya sudah termasuk langkah-langkah transisi untuk mengintegrasikan peserta didik ke dalam pendidikan arus utama, pertimbangan bahasa dan kurikulum, dukungan psikososial, serta pelatihan dan akreditasi guru. Termasuk langkah praktis lainnya yang terkait dengan tata kelola, pendaftaran, sertifikasi, dan dukungan keuangan (UNESCO, 2022).

2. Dampak di Level Internasional

Krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di Ukraina makin memburuk akibat permusuhan yang sedang berlangsung dengan Rusia. Lebih dari satu seperempat keluarga pengungsi internal dengan anak-anak di bawah usia lima tahun melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan bagi anak-anaknya sejak konflik terjadi. Terutama bagi anak-anak di bawah usia lima tahun. Seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar warga Ukraina di daerah yang sulit dijangkau pun turut meningkat. Terutama akibat meningkatnya faktor ketidakamanan, terganggunya pasokan makanan dan tersedianya kapasitas ritel, serta terbatasnya atau bahkan tak adanya akses kemanusiaan (WFP, 2022).

Selain berdampak di level lokal, eskalasi konflik di Ukraina ini juga menimbulkan dampak negatif di level internasional. Lebih dari seperempat populasi Ukraina saat ini mengungsi ke negara tetangga. Menurut Laporan *International Organization of Migration (IOM)* pada 2022, sekitar 60 persen dari pengungsi adalah perempuan. Lebih dari setengahnya menyatakan bahwa mereka mengalami krisis kebutuhan pangan.

Konflik yang belum usai semakin meningkatkan krisis kemanusiaan di Ukraina, meskipun negara-negara anggota PBB yang mendukung Ukraina telah banyak memberikan bantuan. Termasuk bantuan dari *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*, *World Food Programme (WFP)*, serta *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

KESIMPULAN

Proxy war adalah perang antara dua negara yang memiliki kepentingannya masing-masing tanpa mau melibatkan lokasi perang secara langsung di negaranya sendiri. Jadi, demi menghindari perang dengan biaya mahal, maka negara yang berperang akan melibatkan negara pihak ketiga yang akan menanggung kerugiannya. Dampak yang ditimbulkan oleh *proxy war* terhadap negara pihak ketiga sangat besar dan mematikan. Dua negara yang saat ini disinyalir sedang melakukan *proxy war* adalah Amerika Serikat dan Rusia. Negara pihak ketiga yang menjadi sarana *proxy* bagi dua negara ini di antaranya adalah Suriah dan Ukraina.

Dalam dunia anarki internasional, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada suatu negara. Oleh karena itu, demi memenuhi kepentingan nasionalnya maka negara merasa bebas untuk mencapai tujuannya. Bahkan, dengan cara kekerasan sekali pun. Situasi inilah yang membuat kedua negara

adikuasa ini bertindak sedemikian rupa dalam dunia internasional. Selain itu, tensi pertikaian kedua negara ini juga disebabkan oleh munculnya rasa terancam akibat meningkatnya kekuatan negara pesaingnya, begitu juga sebaliknya. Akibatnya, AS dan Rusia berlomba-lomba meningkatkan kekuatan militernya dan menyebabkan konflik dalam jangka panjang. Keadaan ini juga cocok untuk menggambarkan situasi ketegangan antara AS dan Rusia melalui *proxy war* yang mereka lakukan.

Pengaruh ketegangan yang menimpa negara pihak ketiga telah berdampak buruk di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Sebelum terjadinya perang, angka kemiskinan di Suriah mencapai 28 persen. Setelah terjadinya perang, angka kemiskinannya meningkat drastis menjadi 80 persen. Selain itu, menurut pihak berwenang Suriah, sektor minyak dan gas bumi sejak 2011 telah kehilangan sekitar USD74 miliar (Rp1,014 triliun). Pada saat yang sama, PBB juga memperkirakan bahwa biaya kerusakan secara keseluruhan mencapai USD400 miliar (Rp5,482 triliun).

Lebih dari 7.000 sekolah rusak atau hancur dan sekitar dua juta anak putus sekolah. Banyak keluarga Suriah menganggap bahwa berinvestasi dalam pendidikan untuk anak-anak mereka tidaklah praktis, terutama ketika investasi itu membutuhkan pengorbanan makanan atau tempat tinggal. Selain itu, total terdapat 13,5 juta warga Suriah yang terpaksa hidup terlantar. Jumlah ini setara dengan lebih dari setengah populasi negara itu. Hampir 11,1 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana sekitar setengah dari orang yang terkena dampak krisis pengungsi Suriah adalah anak-anak, sedangkan sekitar 13.000 orang terbunuh dan mengalami luka-luka.

Sedangkan konflik yang terjadi di Ukraina telah menghantam perekonomian Ukraina secara keseluruhan, di mana tingkat perekonomiannya menurun drastis hingga sekitar 45,1 persen pada 2022. Fakta ini semakin diperparah dengan lumpuh totalnya berbagai infrastruktur utama Ukraina sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan di level lokal maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbar, T. F. (2020). *Dibombardir Rudal, Ekonomi Suriah Rugi Ribuan Triliun Rupiah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200219152902-4-139057/dibombardir-rudal-ekonomi-suriah-rugi-ribuan-triliun-rupiah>
- Bradbury, C. (2020). *The Education Crisis in Syria*. Borgenproject. <https://borgenproject.org/education-crisis-in-syria/>
- Channelnewsasia. (2022). *Russia warns US of "Consequences" of Ukraine Military aid: Reports*. <https://www.channelnewsasia.com/world/russia-warns-us-consequences-ukraine-military-aid-reports-2629186>
- CNN, I. (2022). *China Tuduh AS Biang Kerok Konflik Rusia vs Ukraina*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220223172424-113-763095/china-tuduh-as-biang-kerok-konflik-rusia-vs-ukraina>
- Finaldin, T. (2019). Persaingan Amerika Serikat dan Rusia melalui Intervensi Militer dalam Konflik Suriah. *Global Mind*, 1(1).
- Ibrahim, A. (2018). *Proxy War between America and Russia in Syrian Conflict 2011-2015*. JOM FISIP, 5(2), 1-11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/22166/21452>

- IRB News. (2018). *Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Korea*. <https://ir.binus.ac.id/2018/12/06/intervensi-amerika-serikat-dalam-perang-korea/>
- IRC. (2022). *Syria 11 years on: Hunger, drought and a collapsing economy threaten even more misery for millions, the IRC warns*. Rescue.Org. <https://www.rescue.org/press-release/syria-11-years-hunger-drought-and-collapsing-economy-threaten-even-more-misery>
- Lechner, S. (2017). *Anarchy in International Relations*. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/Acrefore/9780190846626.013.79>
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (Fifth Edit). Knopf.
- Mudore, S. B., & Safitri, N. (2019). *Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan*. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), 67–92. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437>
- Mumford, A. (2013). *Proxy Warfare and the Future of Conflict*. 1847. <https://doi.org/10.1080/03071847.2013.787733>
- Oktarianisa, S. (2022). *Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina>
- Reid, K. (2022). *Syrian Refugee Crisis: Facts, FAQs, and How to Help*. Worldvision.Org. <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tang, S. (2009). *The Security Dilemma: A Conceptual Analysis*. *Security Studies*, 18 (3), 587–623. <https://doi.org/10.1080/09636410903133050>
- UEC. (2022). *Ukraine Education Cluster Secondary Data Review Report, 4 th of March 2022*. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/uec_sdr_report_2022-03-05.pdf
- UNESCO. (2022, April 22). *Mapping host countries' education responses to the influx of Ukrainian students* | UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/mapping-host-countries-education-responses-influx-ukrainian-students>
- UNICEF. (2018). *UNICEF in Syrian Arab Republic*. <https://www.unicef.org/syria/education>
- WFP. (2022). *WFP Ukraine and Neighboring Countries*. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_Ukraine_and_Neighbouring_Countries_External_Sitrep_%2314_24_April.pdf
- World Bank. (2021). *The World Bank In Syrian Arab Republic*. <https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview#1>
- World Bank. (2022, April 10). *Invasi Rusia untuk Mengecilkan Ekonomi Ukraina hingga 45 Persen Tahun Ini*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year>